

## **PENGARUH JUMLAH BIRO PERJALANAN WISATA, JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DAN PAJAK HOTEL RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG**

**Ni Made Sri Yundari Paramacintya<sup>1</sup>  
Made Kembar Sri Budhi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: paramacintya11@gmail.com / Telp: +62 85738051536

### **ABSTRAK**

PAD merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Beberapa kegiatan sektor pariwisata dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Kabupaten Badung dan Provinsi Bali serta BPKAD Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu analisis jalur. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: 1) jumlah biro perjalanan wisata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pajak hotel restoran di Kabupaten Badung, 2) jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel restoran di Kabupaten Badung, 3) jumlah biro perjalanan wisata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung, 4) jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung, 5) pajak hotel restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung, 6) jumlah biro perjalanan wisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak hotel restoran di Kabupaten Badung, 7) jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak hotel restoran di Kabupaten Badung.

**Kata Kunci:** biro perjalanan wisata, kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran, pendapatan asli daerah

### **ABSTRACT**

*PAD is an important benchmark to determine the level of regional capability in implementing regional autonomy in a real and responsible way. Several tourism sector activities can affect local revenue in Badung regency. The data of this research are secondary data obtained from BPS of Badung, Bali Province and BPKAD Badung. This research uses data analysis technique that is path analysis. The results of this study as follows: 1) the number of travel agency has positive and insignificant effect on hotel restaurant tax in Badung; 2) the number of tourist visit has positive and significant influence to hotel restaurant tax in Badung; 3) the number of tour travel agent influences positive and insignificant to the local revenue in Badung, 4) the number of tourist visit has positive and significant influence to the local income in Badung; 5) hotel restaurant tax has positive and significant effect to the local revenue in Badung; 6) travel tour does not affect the local revenue through the hotel restaurant tax in Badung; 7) the number of tourist visits have a positive and significant effect on the local revenue through hotel restaurant tax in Badung.*

**Keywords:** travel agency, tourist visit, hotel restaurant tax, local revenue

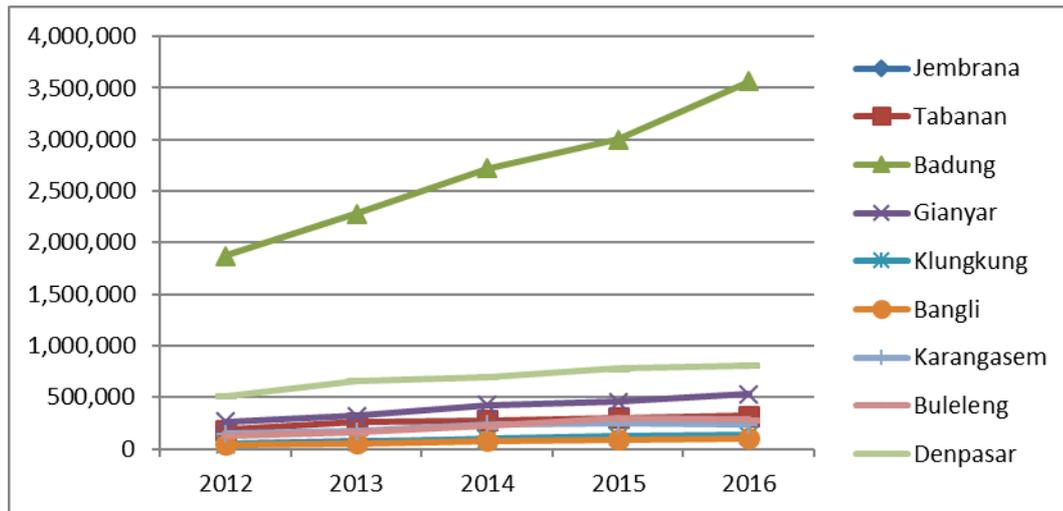
## **PENDAHULUAN**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, namun bisa membawa dampak negatif juga bagi daerah yang memiliki terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Schwartz *et.al*, 2010:21). Untuk mewujudkan otonomi kapasitas fiskal daerah yang kuat di Indonesia mendukung terciptanya otonomi daerah (Sebastiana dan Herman, 2016). Pergeseran pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat ke daerah pada umumnya akan berdampak pada peningkatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat serta mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintah daerah itu sendiri (Kusuma, 2016).

Usaha pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu cara dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Pentingnya peran PAD terhadap kemajuan suatu daerah membuat pemerintah berusaha meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD. Dalam kedepannya pemerintah daerah membuat kebijakan mengenai struktur PAD melalui pajak dan retribusi daerah (Bartle dkk, 2011). Pemerintah juga bisa melaksanakan program amnesti pajak, sehingga masyarakat segera membayar pajaknya yang mana akan meningkatkan pendapatan daerah

(Natasha dan Gunther, 2016). Berikut PAD per kabupaten/kota di Provinsi Bali secara rinci dijabarkan pada Gambar 1.

**Gambar 1 PAD Per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2012-2016  
(dalam Jutaan Rupiah)**



Sumber : Badan Pusat Statistik (Provinsi Bali Dalam Angka, 2017)

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa PAD per kabupaten/kota di Provinsi Bali yang memberikan sumbangan tertinggi kepada PAD yaitu Kabupaten Badung. Kurun waktu lima tahun terakhir PAD Kabupaten Badung menempati posisi pertama dan Kota Denpasar menempati posisi kedua serta daerah yang menerima PAD terendah yaitu Kabupaten Bangli. Penerimaan PAD Kabupaten Badung terbilang sangat besar dan memiliki selisih yang sangat jauh dari Kota Denpasar yang berada di posisi kedua. Hal ini menarik penulis untuk melakukan pengkajian yang lebih dalam mengenai PAD di Kabupaten Badung. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah (Taras dan Sri Artini, 2017).

Kabupaten Badung memiliki keanekaragaman kesenian dan budaya. Mengingat Kabupaten Badung sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang menjadi primadona bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Sumbangan PAD tertinggi terletak pada Kabupaten Badung. Menurut Rinaldi (2012) mengatakan bahwa semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab. Memperbesar pendapatan asli daerah, pemerintah perlu mengembangkan dan memfasilitasi tempat pariwisata agar sektor pariwisata dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi (Wijaya dan Sudiana, 2016). Tidak efisiennya manajemen keuangan daerah tentunya akan menyebabkan tidak optimalnya implementasi pembangunan daerah (Hutajulu dkk, 2012). Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung tahun 2001-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 PAD Kabupaten Badung tahun 2001-2016 diawali dengan terus menurunnya pendapatan asli daerah Kabupaten Badung pada tahun 2001-2003 dikarenakan terjadinya Bom Bali I di tahun 2002. Pada tahun berikutnya pendapatan asli daerah Kabupaten Badung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2006 pendapatan asli daerah Kabupaten Badung kembali mengalami penurunan dikarenakan terjadinya Bom Bali II di tahun 2005. Hal ini menjadikan alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung.

**Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung  
Tahun 2001-2016 (dalam juta rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp. Juta)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2001	203.629	-
2002	310.665	52,56
2003	221.438	-28,72
2004	332.316	50,07
2005	388.582	16,93
2006	362.125	-6,81
2007	498.552	37,67
2008	759.816	54,21
2009	850.168	11,89
2010	886.443	4,27
2011	1.286.770	45,16
2012	1.695.562	31,77
2013	2.027.961	19,60
2014	2.222.625	9,60
2015	3.001.464	35,04
2016	3.563.589	18,73

*Sumber* : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, 2017

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung seperti: kunjungan wisatawan, investasi, lama tinggal, tingkat hunian hotel, biro perjalanan wisata, pajak hotel restoran dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah jumlah biro perjalanan wisata, jumlah kunjungan wisatawan dan pajak hotel restoran. Ketiga faktor tersebut merupakan sektor pariwisata yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber PAD (Sari, 2013).

Banyaknya jumlah biro perjalanan wisata di Kabupaten Badung yang terdaftar di Asita (Asosiasi Biro Perjalanan Wisata) secara langsung usaha tersebut akan membayar pajaknya yang mana akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Sektor pariwisata seperti ekowisata banyak dikunjungi wisatawan (Lacher dan Nepal, 2010). Menurut Rukini dkk. (2015) mengatakan bahwa peramalan jumlah kunjungan wisatawan yang masuk ke suatu negara sangat dibutuhkan bagi pelaku bisnis pariwisata, sehingga jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat

akan mempengaruhi pajak dan retribusi daerah, dikarenakan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung akan berbelanja, menginap di hotel, makan di restoran dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Banyaknya pajak hotel restoran di Kabupaten Badung akan meningkatkan penerimaan pajak daerah yang mana akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Kesimpulannya jumlah biro perjalanan wisata sangat mempengaruhi suatu usaha daya tarik pariwisata (Edralin dan Paulynne Castillo, 2001). Berkembangnya jumlah restoran di Kabupaten Badung yang sama dirasakan di Kota Bandung membuat meningkatkan jumlah restoran yang ada membuat meningkatkan pendapatan yang nantinya akan mematuhi membayar pajak restoran yang akan meningkatkan pendapatan asli daerahnya (Dariah dan Yuhka, 2012).

Kontribusi pariwisata bagi perekonomian lokal memberikan dampak ekonomi yang besar untuk kesejahteraan setempat (Vojnovic dan Knezevic, 2013). Banyaknya wisatawan yang berkunjung dapat dikatakan pembangunan pariwisata di wilayah tersebut telah berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Pengembangan pariwisata mampu mengembangkan usaha kecil dan menengah di daerah wisata, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan memperbaiki infrastruktur di daerah wisata (Esmaeil dan Mahin, 2013). Sektor pariwisata mempunyai peran dan fungsi strategis dalam pembangunan, di samping sebagai penghasil devisa bagi negara dan menghasilkan pendapatan mendekati tingkat potensial atau tingkat yang diinginkan bagi daerah juga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat (Lewis, 2006). Sektor pariwisata juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nasional, mengurangi pengangguran,

menciptakan lapangan kerja, juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (Udayantini dkk., 2015). Industri pariwisata juga diharapkan sebagai penggerak dalam memperbaiki kondisi ekonomi (Skufflic dan Stokovic, 2011).

Mengingat PAD merupakan indikator yang penting dalam APBD, maka pemerintah daerah di Kabupaten Badung terus menggali serta mengelola potensi-potensi yang ada di Kabupaten Badung melalui terobosan-terobosan baru khususnya pada indikator kepariwisatawaan, agar nantinya dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan yang potensial dan mampu meningkatkan kontribusinya dalam membiayai berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah daerah dapat meminimalkan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dan Kabupaten Badung dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri dalam era otonomi daerah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Jumlah Biro Perjalanan Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Pajak Hotel Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung”.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Badan Pusat Statistik Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **Pajak Hotel Restoran**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

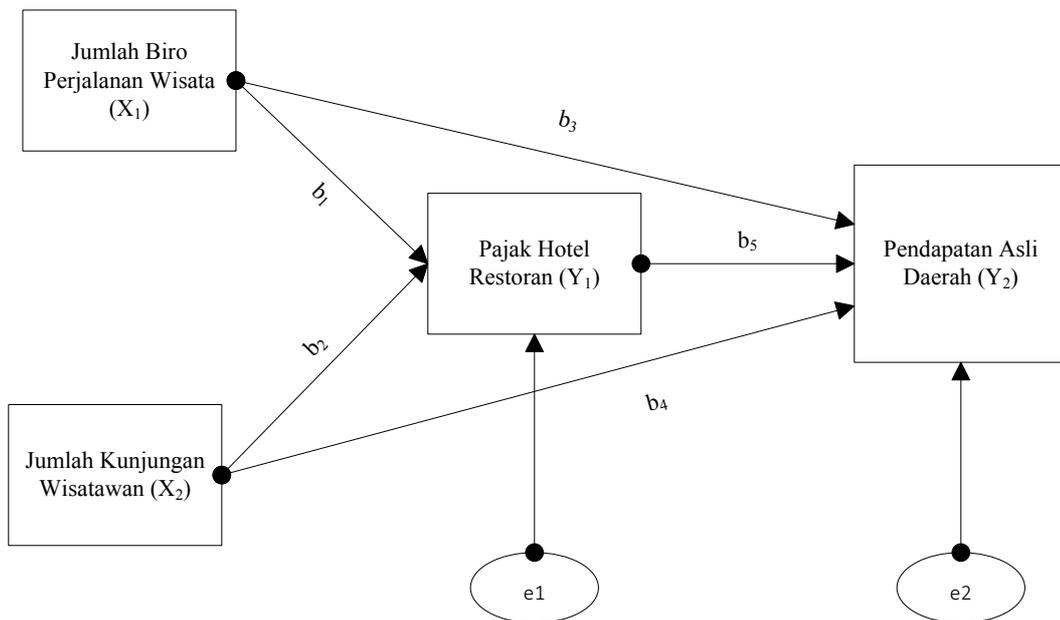
### **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Badung dalam rentang waktu tahun 2001-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik di Kabupaten Badung dan Provinsi Bali serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang didapatkan dengan cara dokumentasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini memfokuskan obyek penelitian kepada pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung.

**Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)**

Menurut Ghozali (2013:249) analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model casual*) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (Sugiyono, 2013:297). Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen dan hubungan yang tidak langsung melalui variabel intervening.

**Gambar 2. Pengaruh Jumlah Biro Perjalanan Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Pajak Hotel Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**



Keterangan:

- Y<sub>1</sub> : Pajak hotel restoran
- Y<sub>2</sub> : Pendapatan Asli Daerah
- X<sub>1</sub> : Jumlah biro perjalanan wisata
- X<sub>2</sub> : Jumlah kunjungan wisatawan
- e<sub>1</sub>, e<sub>2</sub> : Error term, nilai kesalahan observasi diasumsikan nol

$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5$  : Koefisien regresi

Nilai kekeliruan taksiran standar (*standard error of estimate*), yaitu:

$$e_i = \sqrt{(1 - R^2)} \dots \dots \dots (1)$$

Total keragaman data dapat dijelaskan oleh model diukur dengan :

$$R^2_m = P^2 e_1 P^2 e_2 \dots \dots P^2 e_p \dots \dots \dots (2)$$

Dalam hal ini interpretasi terhadap  $R^2_m$  sama dengan interpretasi koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada analisis regresi.  $P e_i$  yang merupakan *standard error of estimate* dari model regresi dihitung dengan rumus :

$$P e_i = \sqrt{(1 - R^2)} \dots \dots \dots (3)$$

Model analisis jalur pada gambar diatas dapat diuraikan dalam dua sub struktur (persamaan) yaitu:

$$\text{Sub Struktur I : } Y_1 = b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_1 \dots \dots \dots (4)$$

$$\text{Sub Struktur II : } Y_2 = b_3 X_1 + b_4 X_2 + b_5 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (5)$$

**Uji Sobel**

Pengujian hipotesis intervening dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel pada tahun 1982 dan dikenal dengan uji Sobel (*Sobel test*). Uji sobel atau sering disebut uji pengaruh tidak langsung merupakan cara untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung antara variabel independen ( $X_1, X_2$ ) terhadap variabel dependen ( $Y_2$ ) melalui variabel intervening ( $Y_1$ ).

Untuk menguji pengaruh tidak langsung digunakan statistic uji z dengan rumus sebagai berikut (Suyana Utama, 2008:151):

$$Z = \frac{ab}{s_{ab}} \dots \dots \dots (6)$$

Standard error koefisien a dan b ditulis dengan  $S_a$  dan  $S_b$ , besarnya standar error tidak langsung (*indirect effect*)  $S_{ab}$  dihitung dengan rumus berikut ini (Suyana Utama, 2008:151):

$$S_{ab} = \sqrt{a^2 S_b^2 + b^2 S_a^2} \dots\dots\dots (7)$$

Keterangan:

- a : koefisien tak standar pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi
- b : koefisien tak standar pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen
- $S_a$  : standar error pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi
- $S_b$  : standar error pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen

Untuk mengetahui pengambilan keputusan uji hipotesa, maka dilakukan dengan membandingkan p-value dengan  $\alpha$  (0,05), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika p-value  $\geq \alpha$  (0,05) atau z hitung  $\leq z$  tabel, maka  $H_0$  diterima berarti M bukan variabel mediasi.
- b. Jika p-value  $< \alpha$  (0,05) atau z hitung  $> z$  tabel, maka  $H_0$  diterima berarti M bukan variabel mediasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian Pengaruh Jumlah Biro Perjalanan Wisata dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pajak Hotel Restoran**

Pengujian persamaan I dilakukan untuk melihat jumlah biro perjalanan wisata dan jumlah kunjungan wisatawan terhadap pajak hotel restoran secara

langsung yang dilakukan dengan menggunakan program *SPSS Versi 24.0* maka hasil uji regresi disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2 Hasil Uji Regresi Jumlah Biro Perjalanan Wisata dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pajak Hotel Restoran**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-661439.124	229041.123		-2.888	.013
	Jumlah Biro Perjalanan Wisata	1152.266	1535.580	.072	.750	.466
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	.464	.048	.932	9.707	.000

a. Dependent Variable: Pajak Hotel Restoran  
Sumber : Data diolah, 2017

Jumlah biro perjalanan wisata dengan nilai sig.  $0.466 > 0.05$  menunjukkan bahwa jumlah biro perjalanan wisata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pajak hotel restoran. Jumlah kunjungan wisatawan dengan nilai sig.  $0.000 < 0.05$  menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel restoran.

### **Hasil Penelitian Pengaruh Jumlah Biro Perjalanan Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Pajak Hotel Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pengujian persamaan II dilakukan untuk melihat jumlah biro perjalanan wisata, jumlah kunjungan wisatawan, dan pajak hotel restoran terhadap pendapatan asli daerah secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan program *SPSS Versi 24.0* maka hasil uji regresi disajikan dalam Tabel 3.

Jumlah biro perjalanan wisata dengan nilai sig.  $0.539 > 0.05$  menunjukkan bahwa jumlah biro perjalanan wisata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Jumlah kunjungan wisatawan dengan nilai sig.

0.015 < 0.05 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak hotel restoran dengan nilai sig. 0.004 < 0.05 menunjukkan bahwa pajhak hotel restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

**Tabel 3 Hasil Uji Regresi Jumlah Biro Perjalanan Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Pajak Hotel Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-746641.240	281711.133		-2.650	.021
	Jumlah Biro Perjalanan Wisata	951.116	1505.731	.035	.632	.539
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	.373	.132	.438	2.826	.015
	Pajak Hotel Restoran	.952	.266	.557	3.576	.004

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data diolah, 2017

### Evaluasi Terhadap Validitas Model

**Tabel 4 Ringkasan Koefisien Jalur**

Regresi	Koef. Regresi Standar	Standard Error	t hitung	p value	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,072	1535,580	0,750	0,466	Tidak signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,932	0,048	9,707	0,000	Signifikan
$X_1 \rightarrow Y_2$	0,035	1505,731	0,632	0,539	Tidak signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,438	0,132	2,826	0,015	Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,557	0,266	3,576	0,004	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2017

Keterangan :

$X_1$  = Jumlah Biro Perjalanan Wisata

$X_2$  = Jumlah Kunjungan Wisatawan

$Y_1$  = Pajak Hotel Restoran

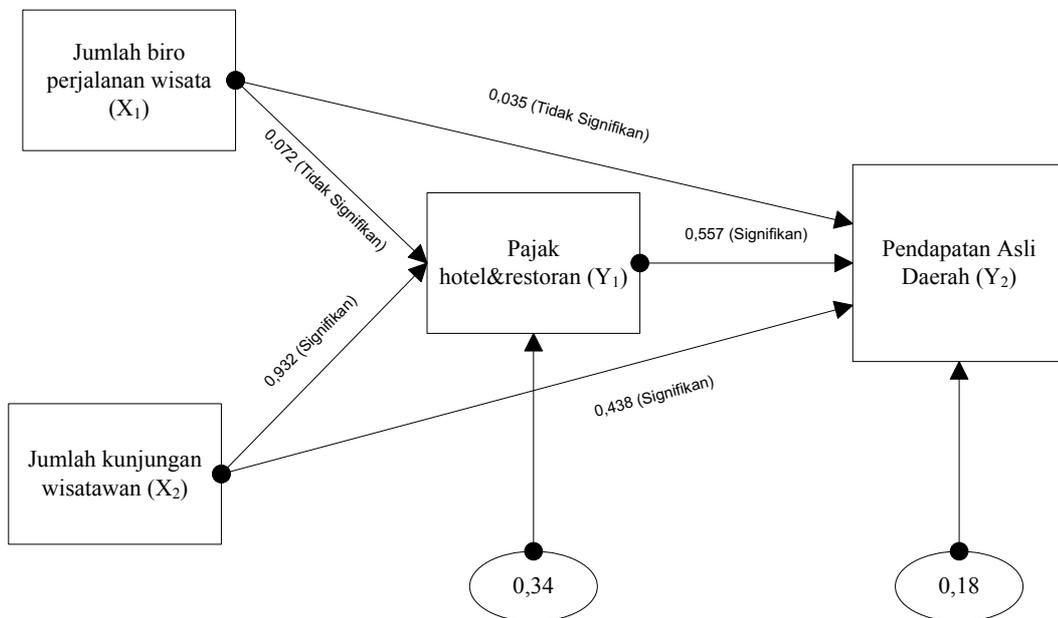
$Y_2$  = Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4 menjelaskan bahwa variabel jumlah biro perjalanan wisata ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel restoran ( $Y_1$ ) dan jumlah kunjungan wisatawan ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel restoran

(Y<sub>1</sub>). Variabel jumlah biro perjalanan wisata (X<sub>1</sub>) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y<sub>2</sub>), Variabel jumlah kunjungan wisatawan (X<sub>2</sub>) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y<sub>2</sub>), dan Variabel pajak hotel restoran (Y<sub>1</sub>) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y<sub>2</sub>).

Berdasarkan ringkasan koefisien jalur di atas, maka dapat dibuat diagram jalur pada Gambar 3.

**Gambar 3 Diagram Analisis Jalur Penelitian**



Berdasarkan Gambar 3 dapat dihitung pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total antar variabel sebagai berikut.

**Tabel 5. Ringkasan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Total Pengaruh Antar Variabel Penelitian**

Variabel	X <sub>1</sub>			X <sub>2</sub>		
	PL	PTL	PT	PL	PTL	PT
Y <sub>1</sub>	0,072	-	0,072	0,932	-	0,932
Y <sub>2</sub>	0,035	0,040	0,075	0,438	0,519	0,957

Sumber: Data diolah, 2017

Keterangan:

PL = Pengaruh Langsung

PTL	= Pengaruh Tidak Langsung
PT	= Total Pengaruh
X <sub>1</sub>	= Jumlah Biro Perjalanan Wisata
X <sub>2</sub>	= Jumlah Kunjungan Wisatawan
Y <sub>1</sub>	= Pajak Hotel Restoran
Y <sub>2</sub>	= Pendapatan Asli Daerah

Pada Tabel 5 pengaruh langsung variabel X<sub>1</sub> terhadap variabel Y<sub>1</sub> adalah 0,072. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung sehingga pengaruh totalnya adalah 0,072. Pengaruh langsung variabel X<sub>1</sub> terhadap variabel Y<sub>2</sub> adalah 0,035. Pengaruh tidak langsung X<sub>1</sub> terhadap variabel Y<sub>2</sub> melalui Y<sub>1</sub> diperoleh dari 0,072 x 0,557 = 0,040. Oleh karena itu, pengaruh total X<sub>1</sub> terhadap variabel Y<sub>2</sub> melalui Y<sub>1</sub> adalah sebesar 0,035 + 0,040 = 0,075.

Pengaruh langsung variabel X<sub>2</sub> terhadap variabel Y<sub>1</sub> adalah 0,932. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung sehingga pengaruh totalnya adalah 0,932. Pengaruh langsung variabel X<sub>2</sub> terhadap variabel Y<sub>2</sub> adalah 0,438. Pengaruh tidak langsung X<sub>2</sub> terhadap variabel Y<sub>2</sub> melalui Y<sub>1</sub> diperoleh dari 0,932 x 0,557 = 0,519. Oleh karena itu, pengaruh total X<sub>2</sub> terhadap variabel Y<sub>2</sub> melalui Y<sub>1</sub> adalah sebesar 0,438 + 0,519 = 0,957.

### Nilai Kekeliruan Taksiran Standar

Untuk mengetahui nilai e<sub>1</sub> yang menunjukkan jumlah *variance* variabel pajak hotel restoran yang tidak dijelaskan oleh variabel jumlah biro perjalanan wisata dan jumlah kunjungan wisatawan dihitung menggunakan rumus.

$$e_1 = \sqrt{(1 - R^2)}$$

$$e_1 = \sqrt{(1 - 0.881)}$$

$$e_1 = 0.345$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai  $e_2$  yang menunjukkan variance variabel pendapatan asli daerah yang tidak dijelaskan oleh variabel jumlah biro perjalanan wisata, jumlah kunjungan wisatawan, dan pajak hotel restoran maka dihitung menggunakan rumus.

$$e_2 = \sqrt{(1 - R^2)}$$

$$e_2 = \sqrt{(1 - 0.965)}$$

$$e_2 = 0.187$$

### Hasil Pengujian Analisis Jalur

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan-hubungan antar variabel penelitian yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Koefisien jalur dapat dibuat dalam bentuk diagram jalur. Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam persamaan struktural, yaitu.

1) Persamaan Struktural I

$$Y_1 = 0.072X_1 + 0.932X_2 + e_1$$

2) Persamaan Struktural II

$$Y_2 = 0.035X_1 + 0.438X_2 + 0.557Y_1 + e_2$$

1) Uji Pengaruh Jumlah Biro Perjalanan Wisata ( $X_1$ ) terhadap Pajak Hotel Restoran ( $Y_1$ )

Hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan antara variabel jumlah biro perjalanan wisata terhadap variabel pajak hotel restoran. Ini berarti statistik uji jatuh pada daerah penerimaan  $H_0$  ( $t_n = 0,750 < 1,753$ ), maka  $H_0$  diterima dan sebaliknya  $H_1$  ditolak. Dengan demikian jumlah biro perjalanan wisata

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pajak hotel restoran di Kabupaten Badung.

Semakin tinggi suatu usaha akomodasi akan menyebabkan berkembangnya pertumbuhan pada sektor pariwisata yang mana meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak (Nawangsih dan Bendesa, 2013). Bahar dalam Himawan (2016) menyatakan bahwa Bisnis *online travel* yang berkembang dalam satu tahun terakhir menekan agen-agen perjalanan wisata yang memiliki ijin usaha perjalanan wisata. Bisnis *online travel* seperti usaha perjalanan wisata pribadi mampu mengembangkan usahanya melalui social media tanpa perlu ijin usaha dan badan hukum, dikarenakan dengan berkembangnya teknologi yang canggih mampu mempromosikan usaha biro perjalanan wisata dengan mudah. Kebanyakan bisnis *online travel* seperti usaha perjalanan wisata pribadi yang tidak terdaftar di Asita (Asosiasi Biro Perjalanan Wisata) mampu mengembangkan usahanya dengan baik dan dapat menjadi saingan yang ketat bagi usaha biro perjalanan wisata yang memiliki ijin usaha dan badan hukum. Ini sangat merugikan bagi biro perjalanan wisata yang memiliki ijin usaha dan badan hukum, sehingga pemerintah harus betul-betul menegakkan aturan tentang peraturan daerah mengenai biro perjalanan wisata. Pelayanan biro perjalanan wisata yang ada di luar negeri lebih baik daripada biro perjalanan wisata di Indonesia, sehingga wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata akan memilih biro perjalanan wisata dari negaranya, yang mana akan ada persaingan yang menyebabkan biro perjalanan wisata di Indonesia menurun. Banyaknya biro perjalanan wisata menyebabkan meningkatnya kunjungan wisatawan ke

Kabupaten Badung yang mana wisatawan akan diajak ke hotel dan restoran, sehingga akan meningkatkan pajak hotel restoran.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jumlah biro perjalanan wisata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pajak hotel restoran di Kabupaten Badung sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh Dombrovski dan Sabina (2010) yang memperoleh hasil dimana sektor pariwisata tidak berpengaruh signifikan terhadap perpajakan yang kuat di Kroasia. Dan Khan (2012) juga memperoleh hasil yang sama industri pariwisata di Pakistan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel Serena Faisalabad.

## 2) Uji Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan ( $X_2$ ) terhadap Pajak Hotel Restoran ( $Y_1$ )

Hubungan positif dan signifikan antara variabel jumlah kunjungan wisatawan terhadap variabel pajak hotel restoran. Ini berarti statistik uji jatuh pada daerah penolakan  $H_0$  ( $t_n = 9,707 > 1,753$ ), maka  $H_0$  ditolak dan sebaliknya  $H_1$  diterima. Dengan demikian jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel restoran di Kabupaten Badung.

Udayantini, dkk (2015) menyatakan bahwa pendapatan sektor pariwisata dipengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Artinya semakin meningkat jumlah kunjungan wisatawan akan meningkatkan pendapatan sektor pariwisata. Hal ini disebabkan oleh jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh besar terhadap hotel dan restoran, apabila tingginya kunjungan wisatawan ke hotel dan restoran maka akan meningkatkan penerimaan pajak hotel restoran, dan sebaliknya rendahnya kunjungan wisatawan ke hotel dan restoran maka akan menurunnya

penerimaan pajak hotel restoran. Pendapatan pajak hotel restoran yang meningkat memungkinkan pemerintah mengalokasikan pengeluaran baru yang signifikan untuk memperbaiki infrastruktur pembangunan (Ashcroft dan David, 2008).

Sejalan dengan penelitian Austriana (2005) yang mengatakan bahwa semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah yang mana akan meningkatkan penerimaan pajak hotel restoran. Sehingga semakin lama tinggal wisatawan di Kabupaten Badung maka peluang wisatawan melakukan pengeluaran akan meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan yang bersumber dari retribusi obyek pajak, pajak hotel maupun pajak restoran.

### 3) Uji Pengaruh Jumlah Biro Perjalanan Wisata ( $X_1$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $Y_2$ )

Hubungan positif dan tidak signifikan antara variabel jumlah biro perjalanan wisata terhadap variabel pendapatan asli daerah. Ini berarti statistik uji jatuh pada daerah penolakan  $H_0$  ( $t_n = 0,632 < 1,753$ ), maka  $H_0$  ditolak dan sebaliknya  $H_1$  diterima. Dengan demikian jumlah biro perjalanan wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung.

Rizkhi (2015) mengatakan bahwa sektor pariwisata mempunyai peran terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan asli daerah walaupun itu tidak banyak. Hal ini disebabkan menurunnya wisatawan maka akan membawa dampak

negatif karena akan semakin banyak pula sarana akomodasi yang tidak dibutuhkan. Selain itu juga akan membawa dampak yang tidak baik juga bagi biro perjalanan wisata karena dengan sedikitnya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang maka akan semakin sedikit pula jasa angkutan yang dibutuhkan. Dengan menurunnya sarana akomodasi dan juga biro perjalanan wisata maka akan memberikan dampak yang tidak baik bagi penyerapan tenaga kerja dan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian diatas yang menyatakan bahwa jumlah biro perjalanan wisata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh Rizkhi (2015), tentang sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah, dimana sektor pariwisata tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2014. Selain itu Tsundoda dan Samuel (2009), juga memperoleh hasil yang sama yaitu dampak sosial dan ekonomi sektor pariwisata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan di kota kecil New England. Dan Ardahaey (2011), tentang dampak ekonomi industri pariwisata di negara berkembang dengan perencanaan strategis jangka pendek dan panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap arus pendapatan dan mata uang.

#### 4) Uji Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan ( $X_2$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $Y_2$ )

Hubungan positif dan signifikan antara variabel jumlah kunjungan wisatawan terhadap variabel pendapatan asli daerah. Ini berarti statistik uji jatuh

pada daerah penolakan  $H_0$  ( $t_h = 2,826 > 1,753$ ), maka  $H_0$  ditolak dan sebaliknya  $H_1$  diterima. Dengan demikian jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Badung.

Purwanti dan Retno (2014), mengatakan bahwa sektor pariwisata yaitu jumlah kunjungan wisatawan merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu pendapatan asli daerah. Pembangunan pariwisata pada Kabupaten Badung ditunjukkan untuk dijadikan sumber pendapatan yang potensial bagi daerah dan juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah Kabupaten Badung dari tahun ke tahun berusaha untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Badung. Data jumlah kunjungan wisatawan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik, dari data tersebut maka diperoleh data jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Badung.

Hasil penelitian diatas yang menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh Purwati dan Retno (2014), tentang jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah, dimana jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2006-2013. Selain itu Pratiwi (2014), juga memperoleh hasil yang sama yaitu jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar.

5) Uji Pengaruh Pajak Hotel Restoran ( $Y_1$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $Y_2$ )

Hubungan positif dan signifikan antara variabel pajak hotel restoran terhadap variabel pendapatan asli daerah. Ini berarti statistik uji jatuh pada daerah penolakan  $H_0$  ( $t_h = 3,576 > 1,753$ ), maka  $H_0$  ditolak dan sebaliknya  $H_1$  diterima.

Dengan demikian pajak hotel restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung.

Hal ini disebabkan karena pajak hotel restoran merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang diandalkan serta mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah. Kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik ke suatu destinasi wisata akan mencari hotel dan restoran untuk beristirahat dan makan, yang mana secara langsung akan meningkatkan pajak hotel restoran itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel restoran di Kabupaten Badung cukup baik. Dengan demikian semakin tinggi penerimaan pajak hotel restoran di Kabupaten Badung maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung.

Sejalan dengan penelitian Utami (2014) yang memperoleh hasil dimana pajak hotel restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung tahun 2009-2013. Selain itu Ari Prayanti, dkk (2014) juga memperoleh hasil yang sama pajak hotel&restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung tahun 2010-2013. Dan Ana Pratiwi (2014) yang memperoleh hasil pajak hotel restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar.

### **Hasil Analisis Uji Sobel**

- 1) Uji Pengaruh Jumlah Biro Perjalanan Wisata ( $X_1$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $Y_2$ ) melalui Pajak Hotel Restoran ( $Y_1$ )

Oleh karena  $Z$  hitung sebesar  $0,005 < 1,96$  Artinya jumlah biro perjalanan wisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak hotel restoran di Kabupaten Badung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel restoran memang benar tidak memediasi jumlah biro perjalanan wisata terhadap pendapatan asli daerah, maka keadaan ini disebut *no mediation*.

- 2) Uji Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan ( $X_2$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $Y_2$ ) melalui Pajak Hotel Restoran ( $Y_1$ )

Oleh karena  $Z$  hitung sebesar  $2,068 > 1,96$  Artinya jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak hotel restoran di Kabupaten Badung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel restoran memang benar memediasi jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah, maka keadaan ini disebut *partial mediation*.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil analisis uji analisis jalur (*path analysis*) dan uji sobel tahun analisis 2001-2016. Jumlah biro perjalanan wisata ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan tidak signifikan secara langsung terhadap pajak hotel restoran di Kabupaten Badung. Jumlah kunjungan wisatawan ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pajak hotel restoran di Kabupaten Badung. Kemudian Jumlah biro perjalanan wisata ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan tidak signifikan secara langsung terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. Jumlah

kunjungan wisatawan ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. Pajak hotel restoran ( $Y_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. Dan Jumlah biro perjalanan wisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak hotel restoran di Kabupaten Badung. Jadi, pajak hotel restoran memang benar tidak memediasi jumlah biro perjalanan wisata terhadap pendapatan asli daerah. Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak hotel restoran di Kabupaten Badung. Jadi, pajak hotel restoran memang benar memediasi jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah perlu menertibkan biro perjalanan wisata yang tidak memiliki ijin usaha seperti : usaha perjalanan wisata pribadi yang mengakibatkan menurunnya jasa biro perjalanan wisata yang memiliki ijin usaha. Dengan ditertibkannya usaha perjalanan wisata pribadi yang harus memiliki ijin usaha, ini akan menguntungkan bagi pemerintah daerah dikarenakan pajak yang dibayarkan biro perjalanan wisata tersebut. Banyaknya biro perjalanan wisata pribadi yang masih berkembang saat ini akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah yang dirancang mengenai biro perjalanan wisata agar nantinya biro perjalanan wisata pribadi tercatat dan bisa membayar pajak dari usaha perjalanan wisata tersebut. Dan pemerintah daerah dapat merancang peraturan daerah yang memungkinkan untuk mengenakan pajak pada biro perjalanan wisata yang milik perseorangan (pribadi) agar nantinya dapat

menjadikan pemasukkan bagi pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah.

## REFERENSI

- Ana Pertiwi, N. L. G. 2014. Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata Dan Phr Terhadap Pad Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal EP Unud*, 3 [3] : 115 - 123 ISSN: 2303-0178.
- Ardahaey, Fateme Tohid. 2011. Economic Impacts of Tourism Industry. *International Journal of Business and Management*, Vol. 6 No. 8.
- Ari Prayanti, N.L.P, I Wayan Suwendra, dan Fridayana Yudiaatmaja. 2014. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2 Tahun 2014.
- Ashcroft, Vincent dan David Cavanaugh. 2008. Survey Of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 44, No. 3, 2008: 335–63.
- Austriana, Ida. 2005. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Badung. 2017
- Badan Pusat Statistik. 2017. Provinsi Bali Dalam Angka 2017. Denpasar: BPS Bali.
- Bartle, John R, Kenneth A. Kriz, dan Boris Morozov. 2011. Local Government Revenue Structure: Trends And Challenges. *Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 23 (2), 268-287 SUMMER.
- Dariah, Atih Rohaeti; Sundaya, Yuhka. Pengaruh Perkembangan Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran Kota Bandung Terhadap Sektor Pertanian Daerah Lainnya di Jawa Barat. **Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan**, [S.l.], oct. 2012. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/2055>>. Date accessed: 31 jan. 2018.

- Dombrovski, Renata dan Sabina Hodzic. 2010. Impact Of Value Added Tax On Tourism. *Journal International Business & Economics Research*, Vol 9 No 10.
- Edraline, Devina M. dan Paulynne Castillo. 2001. An In-depth Study on the Hotel and Restaurant Industry In the Philippines.
- Esmaeil Zaei, Mansour dan Mahin Esmaeil Zae. 2013. The Impact of Tourism Industri on Host Community. *European Jurnal of Tourism Hospitality and Research*, Vol 1 No 2.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Himawan, Adhitya. 2016. Inilah Keluhan Kalangan Biro Perjalanan Wisata pada Pemerintah. <https://m.suara.com/bisnis/2016/01/21/100626/inilah-keluhan-kalangan-biro-perjalanan-wisata-pada-pemerintah.html>. Diakses 22 Desember 2017.
- Hutajulu, Halomoan; Sanggrangbano, Agustina; Bonay, Antonia K.. Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. **Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan**, [S.l.], oct. 2012. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/1903>>. Date accessed: 31 jan. 2018.
- Khan, Munawar. 2012. Challenges Affecting The Tourism Industry In Pakistan Case Study: Faisalabad Serena Hotel. *Thesis*, Centria University Of Applied Sciences.
- Kusuma, Hendra. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. **Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan**, [S.l.], july 2016. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/22735>>. Date accessed: 31 jan. 2018.
- Lacher, R. Geoffrey dan Nepal, Sanjay K. 2010. From Leakages to Linkages: Local-Level Strategies for Capturing Tourism Revenue in Northern Thailand. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, Clemson University*. Pages 77-99.
- Lewis, Blane D. 2006. Local Government Taxation: An Analysis Of Administrative Cost Inefficiency. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 42, No. 2, 2006: 213–33.

- Natasha, Hamilton-Hart dan Gunther G. Schulze. 2016. Taxing Times In Indonesia: The Challenge Of Restoring Competitiveness And The Search For Fiscal Space. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 52, No. 3, 2016: 265–95.
- Nawangsih, Esthisatari; Bendesa, I K.G.. Perbandingan Ketepatan Model Logit Dan Probit Dalam Memprediksi Kecenderungan Tingkat Hunian Kamar Usaha Akomodasi Di Bali 2010. **Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan**, [S.l.], feb. 2013. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/4514>>. Date accessed: 31 jan. 2018.
- Pratiwi, Ni Luh Gede. 2014. Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Objek Wisata dan PHR Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. *e-Jurnal 3(3) : 115-123*.
- Purwanti, Novi Dwi dan Retno Mustika Dewi. 2014. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013. *Jurnal Ilmiah Tahun 2014*.
- Qadarrochman, Nasrul. 2010. Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kota Semarang dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Rinaldi, Udin. 2012. Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal EKSOS*, 8(2):105-113.
- Rizkhi, Candra. 2015. Peran Sektor Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2010-2014. *Skripsi Universitas Jember*.
- Rukini, Rukini; Simpen Arini, Putu; Nawangsih, Esthisatari. Peramalan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Ke Bali Tahun 2019: Metode ARIMA. **Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan**, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/16509>>. Date accessed: 31 jan. 2018.
- Sari, P. Lia Perdana. 2013. Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (JINAH)*, Vol. 2 No. 2 Juni 2013 ISSN : 2089-3310.
- Schwartz, J. Brad, Rachel Racelis dan David K. Guikay. 2010. Decentralization and Local Government Health Expenditures in the Philippines. *Working Paper The Measure Project Carolina Population Center*.

- Sebastiana, V dan Herman Cahyo. 2016. Analysis of Economic Performance as the Independence Indicators of Government in East Java Province. *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 5, no. 2, pp.272-285.
- Skuflic, Lorena and Stokovic Igor. 2011. Demand Function for Croatian Tourist Product: *A Panel Data Approach. Modern Economy*, 2(1), pp:49-53.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suyana Utama, Made. 2008. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Tsundoda, Tomoko dan Samuel Mendlinger. 2009. Economic and Social Impact of Tourism on a Small Town: Peterborough New Hampshire. *Journal Serviw Science & Management*, 2:61-70.
- Udayantini, K.D., Bagia, I.W., dan Swendra, I.W. 2015. Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Pendapatn Sektor Pariwisata di Kabupaten Buleleng periode 2010-2013. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, Volume 3. No 5.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Utami, Engi Sandi. 2014. Pengaruh Pajak Restoran Dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Tahun 2009-2013). *Jurnal Ilmiah Tahun 2014*.
- Vojnovic, Nikola and Knezevic, Rade. 2013. Economic And Tourism Indicator as a Menas of Monitoring Sustanaible Tourism: *The Case Of Inland Istria. UTMS Journal of Economics*, 4(2), pp:213-230.
- Wijaya, Agastya Brahma dan I Ketut Sudiana. 2016. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015. *E-Jurnal EP Unud*, 5 [12]: 1384-1407 ISSN: 2303-0178.